

# OTONOMI PENDIDIKAN BERBASIS DEMOKRATISASI DAN BUDAYA ETOS KERJA

*A. Ubaedi Fathuddin\**

**Abstract:** The development of education in the era of regional autonomy requires the implementation of democratic values and culture of work ethic. Democratization of education will encourage local people to be citizens who understand the rights of life and are not easily exploited. Meanwhile, the development of the work ethic culture through education is assumed to be fundamentally impact on various aspects of local community life. The combination of both the autonomy of education will create a clean Government which is participative, innovative and independent.

**Kata kunci:** otonomi pendidikan, demokrasi, etos kerja.

## PENDAHULUAN

Berbarengan meningkatnya arus otonomi daerah sebagai representasi pembangunan demokrasi di Indonesia, pemerintah telah memberlakukan kebijakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses-proses politik dan kenegaraan. UU No. 22/1999 yang direvisi menjadi UU No 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah adalah wujud dari kehendak pemerintah dalam mempercepat laju proses demokratisasi tersebut. Dalam Undang-Undang itu, khususnya Pasal 7 Ayat 1 ditegaskan, unsur-unsur penting dalam penyelenggaraan negara –selain bidang politik luar negeri, pertahanan dan

---

\*. *Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Pekalongan*  
*e-mail: abu.refah@yahoo.co.id*

keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama—diserahkan kepada pemerintah kabupaten atau kota.

Lalu bagaimana kebijakan otonomi daerah ini berimplikasi pada dunia pendidikan? Apakah daerah sepenuhnya memegang kebijakan pendidikan, ataukah masih ada keterlibatan pusat dalam penyelenggaraan pendidikan. Karena selama “masa uji” otonomi daerah, terjadi tarik-ulur antara pusat dan daerah terhadap berbagai kebijakan dan sistem pendidikan. Agaknya, dua hal tersebut hadir sebagai isu sentral di antara berbagai persoalan prinsip dalam konteks memahami otonomi pendidikan dalam bingkai otonomi daerah.

Lahirnya UU Otonomi Daerah di atas tentu memiliki makna strategis dan signifikan bagi kebijakan pendidikan yang akan diambil selanjutnya. Ini bisa dimengerti, karena dunia pendidikan kita, selama masa Orde Baru, secara sadar atau tidak telah berkembang subur sebagai arena KKN bagi para birokrat pendidikan (Syaukani HR, 2001: 116). Kondisi ini berpengaruh pada budaya kerja akademik lembaga pendidikan, di mana nuansa intervensi sentralistik-birokratik amat kental.

Paradigma pragmatis yang diterapkan pemerintah pusat, sejatinya telah membelenggu dan tidak mengakomodasi berbagai kepentingan dan kultur yang terdapat pada berbagai lembaga sekolah yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Akibatnya, penyelenggaraan pendidikan di negara kita hampir saja tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat lokal (daerah) pada tingkat *grass-root* (sekolah). Padahal pada tingkat *grass-root* inilah pendidikan berjalan. Sebabnya, karena masyarakat akar rumput memang tidak dilibatkan dalam upaya perencanaan, pengelolaan, dan monitoring pelaksanaan pendidikan.

Munculnya budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagai dampak kebijakan sentralistik-birokratis sejatinya dipicu oleh ketiadaan budaya etos kerja dan idealisme dalam diri para *stake-holder* pendidikan. Oleh karena itu, kausalitas antara demokratisasi pendidikan dan etos kerja pendidikan harus berjalan secara seimbang, sinergis dan mutualisma. Ketika demokratisasi pendidikan dikedepankan, maka diasumsikan akan memunculkan budaya kerja yang transparan, efektif dan mengena sasaran. Atau sebaliknya, manakala etos kerja dan nilai-nilai idealisme pendidikan di kedepankan dalam era otonomi daerah, maka akan memunculkan budaya *clean government* di kalangan birokrasi pendidikan.

## MENUJU DEMOKRATISASI PENDIDIKAN NASIONAL

### 1. Signifikansi Demokratisasi Pendidikan

Secara yuridis, UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 memberikan landasan kepada kita tentang hak memperoleh pendidikan. Ketentuan ini juga merupakan landasan bagi dimungkinkannya pelaksanaan demokratisasi pendidikan. Karena prinsip ini bermakna bahwa tidak seorang pun warga negara yang boleh diperlakukan secara tidak adil dalam menggunakan haknya memperoleh pendidikan (Soedijarto, 2003: 171).

Untuk memungkinkan warga negara menggunakan haknya, pemerintah yang demokratis yang memperoleh kepercayaan dari rakyat harus mengembangkan suatu sistem pendidikan yang memungkinkan warga negaranya menggunakan hak tersebut. Atas dasar prinsip demokrasi pendidikan ini, para *founding father* kita telah menetapkan kewajiban pemerintah yakni mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional (Soedijarto, 2003: 171).

Dalam perjalanannya, usaha para *founding father* kita menghadapi kendala serius, khususnya di era Orde Baru lalu, berkaitan sistematisasi pendidikan nasional yang cenderung birokratis. Berbagai lembaga pemerintah yang menangani pelaksanaan pendidikan nasional menambah kekaburan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Akibatnya, program-program pendidikan nasional hanya bertengger di atas keputusan-keputusan makro dan hampir tidak terlaksana pada tingkat lembaga-lembaga pendidikan, yaitu sekolah (H.A.R Tilaar, 1999: 109).

Pendekatan sistem birokratis ini sebagaimana dikatakan Ki Supriyoko, juga telah menyebabkan kotor dan amburadulnya manajemen dan administrasi pendidikan kita. Buktinya adalah banyak soal ujian nasional (UN) yang bocor dan para pelaggarnya aman-aman saja, bahkan justru diberi kesempatan menempuh ujian ulang, dibiayai dengan keuangan negara dan kebanyakan siswa diluluskan. Padahal, di Amerika atau negara-negara maju lain, bila ada yang kedapatan memperoleh bocoran soal ujian secara sengaja, maka ia akan dihukum; setidak-tidaknya tidak diperbolehkan mengikuti ujian dan yang pasti tidak lulus (Ki Supriyoko, 2001). Bukti lainnya adalah kasus pungutan liar atas guru SD yang akan dilantik menjadi kepala sekolah sebesar Rp. 15 juta per orang (Syaukani HR.: 2001, 115).

Lebih lanjut, tertutupnya ruang demokratisasi pendidikan telah memunculkan kebijakan penyeragaman kurikulum, guru sentris, tertutupnya ruang dialogika pembelajaran dalam kelas dan sebagainya. Akibat yang muncul kemudian sudah bisa ditebak, pendidikan kita mengalami degradasi mutu, stagnasi peran dan fungsi: ketidakberdayaannya dalam mengentaskan berbagai persoalan bangsa, yang sejatinya bagian dari tugas pendidikan. Pendidikan kita juga tidak dapat menghasilkan SDM berkualitas, yang mampu menghadapi tantangan globalisasi dewasa ini dan di masa mendatang (Ta'rifin: 2001).

Menyadari fenomena demikian, demokratisasi pendidikan atau debirokratisasi pendidikan sebagai paradigma baru pendidikan nasional di era otonomi daerah, dengan berbagai derivasinya, seperti dewan/komite sekolah dan budaya sekolah patut dikedepankan dalam usaha mengatasi permasalahan pendidikan nasional. Sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas dalam implementasi pendidikan (Jaja Jamaluddin, 2001).

## 2. Asas Demokratisasi Pendidikan

Implementasi demokratisasi pendidikan setidaknya menghendaki tiga asas/ proses fundamental pendidikan. *Pertama*, kebebasan; *kedua*, pluralitas; dan *ketiga* humanistik.

*Pertama*, siswa—sebagaimana manusia lain—adalah makhluk yang diciptakan Tuhan dalam aura kebebasan dan hidup untuk bebas. Guru atau lembaga pendidikan (sekolah) tidak dibenarkan sama sekali mengintervensi intelektualitas siswa serta mendominasi gagasan dan pikiran mereka. Pengarahan terhadap siswa agar mereka kreatif, diskutif, inovatif dan mandiri adalah hal terbaik yang harus dilakukan guru dalam proses demokratisasi pendidikan agar mereka menjadi siswa yang mampu menjadi dirinya sendiri dan mampu melihat realitas kehidupan (Freire, 1970: 66-70; Ivan Illich, 2000: 64). Dengan demikian berarti, guru tidak dibenarkan sama sekali memposisikan dirinya sebagai satu-satunya sumber pengetahuan (*teacher oriented*) bagi siswa-siswanya.

*Kedua*, proses demokratisasi pendidikan mengharuskan adanya nuansa pluralisme. Makna pluralisme di sini berarti wujud kesadaran untuk memahami perbedaan yang ada dalam lingkungan pendidikan, baik perbedaan kultur, kondisi sosial-ekonomi, politik, etnis, wilayah intelektualitas, dan lain sebagainya. Kesadaran pluralisme di tingkat mikro, yakni pembelajaran di

sekolah (kelas) akan berimplikasi pada nilai-nilai perdamaian dan kebersamaan lingkungan akademik. Sekolah/institusi pendidikan diprediksi akan benar-benar menjadi lembaga yang mampu mengusung nilai-nilai intelektualisme dan demokratisasi pendidikan.

Sementara itu, gagasan-gagasan pluralisme pendidikan di tingkat makro, akan berimplikasi pada keragaman kebijakan pendidikan. Sentralisasi, birokratisasi, dan uniformitas tidak berlaku lagi. Justru yang dikedepankan adalah desentralisasi, deuniformitas, debirokratisasi, dan deregulasi pendidikan.

*Ketiga*, implementasi pendidikan mengharuskan adanya nilai-nilai humanistik. Entitas humanisme pendidikan berarti, proses pembelajaran diarahkan kepada upaya manusia agar menjadi individu yang merdeka. Hal ini akan tercapai melalui pendekatan pendidikan yang mementingkan pengembangan kreativitas dalam kepribadian peserta didik. Pendidikan humanistik juga mengarahkan siswa agar mampu menjadi dirinya sendiri secara utuh, manusia paripurna (Syaukani HR, 2002: 84-85). Pada tingkat lanjut, mengembangkan wacana-wacana humanisme dalam pendidikan dilakukan untuk meningkatkan rasa kepedulian dan kesetiakawanan sosial peserta didik (Whitehead, tt.; Ivan Illich, 2000: 64).

Bila ketiga asas/proses pendidikan di atas berjalan dengan baik, maka demokratisasi pendidikan akan mampu menjadi basis utama pendidikan di era otonomi daerah.

## **PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN BUDAYA ETOS KERJA**

### **1. Makna Etos Kerja**

Untuk menuju budaya etos kerja pendidikan, penjabaran makna etos kerja agaknya patut dikedepankan. Secara etimologi, etos kerja berasal dari bahasa Yunani “etos” yang berarti watak atau karakter. Makna lengkap “etos” adalah karakteristik, sikap, kebiasaan, kepercayaan dan sebagainya yang sifatnya khusus tentang seseorang atau sekelompok manusia (Nurcholish Madjid, 1999: 58-59).

Dari perkataan “etos” ini muncul istilah etika dan etis yang merujuk pada akhlak atau bersifat akhlaki, yakni kualitas esensial seseorang, kelompok, maupun bangsa (Hassan Shadilly dan John M. Echols, 1977). Etos juga bermakna jiwa khas suatu kelompok manusia, yang dari jiwa khas tersebut berkembang pandangan kelompok atau bangsa tersebut tentang yang baik

dan yang buruk. Harus diakui, etos kerja-lah yang menjadikan seseorang, kelompok atau suatu bangsa memiliki karakteristik, sikap dan motivasi untuk bekerja dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup.

Termasuk dalam pemahaman ini adalah, kerja janganlah dipahami hanya sekedar hak, tetapi juga kewajiban manusia secara individu. Hak untuk memperoleh gaji, hak untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan, dan sebagainya. Sebagai kewajiban, kerja harus dilaksanakan secara profesional, amanah dan jujur.

Dalam konteks hak mendapatkan pekerjaan, setiap proses produksi kerja/industrialisasi sering dimaknai dengan mendapatkan pekerjaan. Hal ini menjelaskan bahwa, hampir semua kebijakan ekonomi dan tenaga kerja, Undang-undang serta statistik didominasi parameter-parameter lapangan kerja dan upaya untuk mendapatkan pekerjaan.

Oleh karena itu, agar kinerja seseorang, kelompok atau suatu bangsa dapat berjalan dengan baik, sehingga kemungkinan terjadinya pengangguran dapat ditekan, maka sudah seharusnya kita semua menjadikan suasana kerja yang ada dipenuhi dengan semangat dan etos kerja; sebagai sarana dan tujuan. Sebagai sarana, kerja mampu membawa pelakunya mencapai identitas, prestise dan tingkat sosial tertentu. Sedangkan sebagai tujuan, kerja berarti sebuah proses yang dijalani oleh manusia yang menempatkannya di atas aktivitas lainnya.

Dengan demikian, kerja adalah inti dari kualitas hidup manusia. Kerja adalah cara utama bagi manusia untuk berusaha mencukupi kebutuhan akan kualitas hidup, pengakuan sosial dan sebagainya. Jadi, tanpa alasan apapun, kerja harus selalu didasari oleh budaya etos kerja yang tinggi.

## **2. Lemahnya Budaya Etos Kerja Pendidikan Nasional**

Sistem sentralisasi dan birokratisasi pendidikan telah menciptakan suasana in-efisiensi yang memungkinkan tumbuh suburnya perilaku KKN dan berbagai perilaku kriminal berbaju pendidikan. Ini disebabkan karena, sistem ini tidak mengedepankan idealisme dan budaya etos kerja dalam praksisnya.

Pendidikan kita, selama kurang lebih tiga dasawarsa telah terjebak pada konsep pendidikan —meminjam istilah Poulou Freire—”gaya bank”, yaitu konsep pendidikan yang memandang manusia sebagai makhluk yang dapat disamakan dengan sebuah benda dan gampang diatur sehingga telah berhasil

mengarahkan pendidikan itu sendiri pada semangat penindasan. Hal ini mengindikasikan bahwa etos kerja pendidikan kita selama ini telah berjalan pada jalur yang salah sehingga telah membelah dua kelompok praktisi pendidikan ke dalam wilayah “penindas” dan “tertindas”.

Implikasinya, pendidikan kita telah mencetak manusia-manusia hedonis, yakni manusia-manusia yang terjebak dalam khayalan kehidupan kaya. Anehnya, hal ini tidak disikapi dengan kerja keras untuk mencapainya. Sebaliknya, keterpesonaan mereka terhadap hedonisme penguasa dan konglomerat justru memperbesar daya khayal mereka sehingga mewariskan watak malas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Lebih dari itu, fenomena semacam ini juga telah menghilangkan etos dan elansitas generasi didik kita dalam menjalani kehidupan; dan manusia yang tidak menghargai diri, yang seringkali merasa bahwa mereka sebenarnya tidak berguna, tidak tahu apapun, tidak mampu mempelajari apapun, malas, lembek, tidak produktif, dan rendah diri. Akibatnya elansitas mereka untuk menjalani hidup secara normal pun terpasung dan bahkan tercerabut.

Artinya, selama ini, etos kerja pendidikan kita justru telah terjebak pada sebuah paradigma yang salah sehingga berjalan pada jalur yang salah pula.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi lemahnya etos kerja pendidikan nasional kita.

- (1) *Kesejahteraan ekonomi*. Faktor ini merupakan sebab utama rendahnya etos kerja pendidikan kita. Apapun istilahnya, guru dan tenaga kependidikan dalam batas pengabdianya—membutuhkan jaminan kesejahteraan dalam menjalani profesinya, sebagaimana profesi-profesi lainnya.

Dalam konteks ini, bagaimana seorang pendidik akan mampu mengoptimalisasikan etos kerjanya, apabila perhatian mereka terus terbelah pada dua bentuk kewajiban yang sama-sama harus dipenuhinya, mengajar dan kebutuhan keluarga. Akibatnya, etos kerja pendidik dalam melaksanakan kewajiban pendidikannya menjadi sangat rendah karena dihadapkan pada dua pilihan yang sama beratnya, dan peserta didik pun ikut menjadi korbannya.

Sebaliknya, banyak anak-anak usia sekolah, khususnya di daerah-daerah, yang terpaksa harus membantu orang tuanya mencari nafkah. Bagaimana mungkin mereka dapat melaksanakan kewajiban pendidikan mereka secara optimal apabila di siang hari atau bahkan malam harinya mereka

harus membanting tulang membantu orang tua. Keadaan seperti inilah yang kemudian mengakibatkan hilangnya etos peserta didik sehingga bermuara pada rendahnya minat baca dan minat belajar mereka.

- (2) *Marjinalisasi Pendidikan*. Selama ini, pemerintah selalu menganaktirikan sektor pendidikan. Pendidikan tidak pernah dijadikan sebagai prioritas utama pembangunan. Marjinalisasi sektor pendidikan oleh pemerintah kentara sekali pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), di mana pemerintah, paling tidak sampai tahun 2008, tidak pernah secara proporsional mengalokasikan untuk sektor ini sebesar 20 persen setiap tahunnya. Sebenarnya, kesejahteraan ekonomi tidak akan begitu berpengaruh terhadap etos kerja pendidikan kita apabila ditutupi oleh perhatian pemerintah yang sangat tinggi terhadap pendidikan. Sebab, dengan perhatian yang tinggi, implementasi prioritas pembangunan pemerintah pada sektor pendidikan tidak akan hanya terhenti pada tataran kebijakan wajib belajar saja, tetapi juga akan menyentuh pada dimensi pemerataan pendidikan bagi masyarakat miskin Indonesia. Dengan begitu, masyarakat—khususnya masyarakat daerah—tidak akan terlalu terbebani biaya pendidikan, dan para generasi bangsa pun dapat belajar secara optimal.
- (3) *Paradigma pendidikan*. Selama ini, pendidikan kita sangatlah *cognitif oriented* sehingga kreativitas, *skill*, dan kompetensi peserta didik terpasung dan tercerabut dari proses pembelajaran. Berkenaan dengan ini, agaknya tidak mengherankan apabila angka pengangguran terdidik di Indonesia kian meningkat.
- (4) *Minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya makna pendidikan*. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap signifikansi pendidikan juga sangat mempengaruhi lemahnya etos kerja pendidikan nasional. Bahkan, tingkat kesadaran masyarakat terhadap makna pendidikan itu mempunyai korelasi yang sangat erat dengan jaminan kesejahteraan para pendidik. Etos kerja pendidikan kita pun semakin melemah sehingga mutu pendidikan kita selalu diragukan.
- (5) *Indoktrinasi pendidikan*. Selama masa Orde Baru, pendidikan kita menjadi ajang indoktrinasi yang membosankan dan sepi dari dialog, tawa dan canda peserta didik. Indoktrinasi pendidikan juga membuat pendidik—jadi tidak hanya peserta didik—merasakan kebosanan dan kejenuhan dalam menjalankan tugas pendidikannya. Bahkan, tidak menutup

kemungkinan, tugas pendidikan justru akan menjadi beban yang teramat berat baginya dalam menjalani kehidupan. Dengan kondisi demikian, baik pendidik maupun peserta didik, akan kehilangan semangatnya sehingga etos kerja pendidikan pun melemah. Puncaknya, pendidikan tidak terselenggara secara evaluatif dan optimal.

Dari paparan di atas, dapat diketahui bahwa etos kerja pendidikan merupakan pra-syarat yang sangat penting bagi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan Indonesia. Berkenaan dengan ini, etos kerja harus senantiasa ditumbuh-kembangkan dalam spirit penyelenggaraan pendidikan Indonesia. Dan, di sinilah pendidikan etos kerja menemukan signifikansinya. Oleh karena itu, sudah saatnya usulan paradigma etos kerja dalam nuansa demokratisasi pendidikan patut didukung sehingga menumbuhkan sistem kerja anggota masyarakat yang berbasiskan etos kerja di era otonomi daerah ini.

## **SIMPULAN**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, pembangunan dan pengembangan otonomi pendidikan menghendaki adanya pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dan budaya etos kerja.

Demokratisasi pendidikan mengharuskan adanya transparansi pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk mampu menjadikan warga masyarakatnya sebagai warga yang partisipatif, kreatif, inovatif dan mandiri. Demokratisasi pendidikan akan menjadikan masyarakat daerah menjadi warga yang tahu hak-haknya serta tidak mudah dieksploitasi.

Untuk menuju ke arah demokratisasi pendidikan, maka menurut penulis, dibutuhkan tiga nilai dasar dalam proses pembelajaran, yakni kebebasan, pluralisme dan humanisme. (1) Pembelajaran nilai-nilai pembebasan akan melahirkan peserta didik yang bertanggung jawab, inovatif dan mandiri dalam menghadapi realitas kehidupan; (2) Pembelajaran nilai-nilai pluralisme akan memunculkan peserta didik yang menyadari akan perbedaan hak dan realitas di luar diri, kelompok dan lingkungannya; (3) Sedangkan pembelajaran nilai-nilai humanisme akan mencetak peserta didik yang menghargai martabat dan nilai-nilai kemanusiaan secara utuh.

Implementasi otonomi pendidikan, di samping mengedepankan demokratisasi pembelajaran juga mengharuskan terwujudnya budaya etos

kerja peserta didik dan seluruh lapisan masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang memang minim fasilitas kerja dan pendidikannya. Pembangunan budaya etos kerja melalui pendidikan ini diasumsikan akan berdampak secara fundamental terhadap berbagai kegiatan hidup sehari-hari masyarakat daerah.

Perpaduan budaya etos kerja tinggi dan demokratisasi pendidikan yang mengakar pada diri masyarakat, akan mewujudkan *clean government*, masyarakat pendidikan yang partisipatif, inovatif serta mandiri; yang selalu *concern* terhadap berbagai permasalahan pendidikan, pemerintahan dan kemasyarakatan.

Dengan demikian, berbagai hal yang menyebabkan lemahnya etos kerja bangsa kita seperti rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, marjinalisasi pendidikan, kurangnya kesadaran terhadap makna pendidikan, paradigma pendidikan yang membelenggu (indoktrinatif), dan lain sebagainya harus segera dieliminasi agar paradigma etos kerja dalam nuansa demokratisasi pendidikan mampu menumbuhkan sistem kerja anggota masyarakat yang berbasiskan etos kerja di era otonomi daerah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Freire, Paulo. 1970. *The Oppressed of Education*. New York: The Seabury Press.
- Illich, Ivan. 2000. *Deschooling Society*, terj. *Bebaskan Masyarakat dari Belenggu Sekolah*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Jamaludin, Jaja. 2001. *Dewan Sekolah dan Birokrasi*. Media Indonesia, Juni.
- Ki Supriyoko. 2001. *Saatnya Membenahi Pendidikan*. Kompas, Agustus.
- M. Echols, John & Hassan Shadily. 1977. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Madjid, Nurcholish. 1999. *Tafsir Islam Perihal Etos Kerja*, dalam *Nilai dan Makna Kerja dalam Islam*. Jakarta: Nuansa Madani.
- Soedijarto. 2003. *Pendidikan Nasional sebagai Proses Transformasi Budaya*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Syaukani, HR. 2001. *Pendidikan Paspur Masa Depan: Prioritas Pembangunan dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: Nuansa Madani.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Titik Temu dalam Dunia Pendidikan: Tanggungjawab Pemerintah, Sekolah, Masyarakat, dan Orang Tua dalam Membangun Bangsa*. Jakarta: Nuansa Madani.

- Ta'rifin, Ahmad. 2001. *Mencari Model Demokratisasi Pendidikan*. Jakarta: Media Indonesia.
- Tilaar, H.A.R. 1999. *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Undang-undang No. 32/2004 tentang Otonomi Daerah.
- UUD 1945
- Whitehead, Albert N. tt. *The Aim of Education*.